



**PROSIDING** KONFERENSI AKUNTANSI KHATULISTIWA

TEMA : *“Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”*

# PROSIDING KONFERENSI AKUNTANSI KHATULISTIWA

**TEMA :**  
*“Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”*

*Pontianak, 20 November 2019*



Penerbit :  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Tanjungpura**  
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi  
Pontianak, Kalimantan Barat.

ISBN 978-602-53460-4-0



9 786025 346040



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Tanjungpura

**PROSIDING  
KONFERENSI AKUNTANSI KHATULISTIWA  
Tahun 2019**

**TEMA :**

**“Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”**

**Pontianak, 20 November 2019**



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Tanjungpura**

## Prosiding

### Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019

Tema : “Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”

#### Reviewer :

Dr. Sumiyana, SE, MSi, Ak, CA  
Juanda Astarani, SE, MSc, CSRS

#### Streering Committee :

Dr. Hernawan, SE, MS, Ak  
Juanda Astarani, SE, MSc, CSRS  
Vitriyan ESPA, SE, MSA, Ak, CA

#### Organizing Committee :

Ketua : Khristina Yunita, SE, MSi, Ak  
Anggota : Sari Rusmita, SE, MM  
Ella Devi Setyawati, SE, MM  
Annisa, ST  
Melinda, SE

#### Editor :

Sari Rusmita, SE, MM  
Rafles Ginting, SE, M.Ak  
Fera Damayanti, SE, M.Ak  
Ayu Umyana, SE, M.Ak  
Djunita Permata Indah, SE, M.Ak

#### Desain Cover :

Annisa, ST

ISBN : 978-602-53460-4-0

**Penerbit** : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura  
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat  
Telpon : (0561) 743465, 766840  
Email : [akuntansi.khatulistiwa18@gmail.com](mailto:akuntansi.khatulistiwa18@gmail.com)

Cetakan Pertama, Januari 2020

*Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang*

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku Prosiding Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019 yang merupakan hasil penelitian yang diselenggarakan pada tanggal 20 November 2019 di lingkungan Jurusan AKuntansi Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dapat diwujudkan.

Buku prosiding tersebut memuat sejumlah artikel hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak/Ibu dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dan ditata oleh tim dalam kepanitiaan Konferensi Akuntansi Khatulistiwa. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Plt. Dekan FEB UNTAN, Ibu Dr. Barkah, SE, MSi yang telah memfasilitasi semua kegiatan Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019.
2. Ketua Jurusan Akuntansi FEB UNTAN, Bapak Dr. Hernawan, SE, MS yang telah memotivasi dan memfasilitasi terjadinya Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019.
3. Reviewer, Bapak Dr. Sumiyana, SE, MSi, Ak, CA dan Bapak Juanda Astarani, SE, MSc, CSRS, yang telah bersedia dan meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk menelaah artikel demi artikel.
4. Bapak/Ibu panitia Konferensi ini yang sudah bersedia membagi ide dan bekerjasama sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan sukses.
5. Bapak/Ibu yang bersedia untuk mengsubmit karya tulisannya pada prosiding ini.
6. Mahasiswa/I yang bersedia untuk mengsubmit rencana penelitian dan hasil penelitiannya pada prosiding ini.

Semoga buku prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan ilmu, khususnya di bidang akuntansi. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi dalam meneliti dan menyusun tugas akhirnya.

Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan buku prosiding ini.

Pontianak, 20 November 2019  
Ketua,

Khristina Yunita, SE, MSi, Ak



## DAFTAR ISI

### **Materi Utama**

*The Role of Accountant in Facing 4.0 Industrial Revolution*

Oleh : Dr. Sumiyana, SE, MSi, Ak, CA

### **Artikel**

**Persepsi Akuntan Pendidik Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kota Pontianak**

Oleh : Haryati dan Haryono [1-14]

**Pengaruh Reputasi KAP dan Sistem pengendalian Intern terhadap Audit Delay pada Industri Perbankan di Indonesia 2014-2018**

Oleh : Dr. Nella Yantiana, SE, MM, Ak, CA, CMA, CPA [15-24]

**Pengelolaan Keuangan Keluarga Pegawai Negeri Sipil Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura**

Oleh : Vitriyan Espa [25-35]

**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang)**

Oleh : Syarbini Ikhsan [36-42]

**Desain Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Masjid Serta Desain Pola Kerjasama Ekonomi Antar Masjid Di Kota Pontianak**

Oleh : Juanda Astarani [43-60]

**Studi Bibliografi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Dalam Penelitian Akuntansi Di Indonesia**

Oleh : Nina Febriana Dosinta dan Nur Fitriana Hamsyi [61-72]

**Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa (Studi Kasus Di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura)**

Oleh : Hernawan dan Juanda Astarani [73-87]

**Desentralisasi Fiskal Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Oleh : Sari Rusmita [88-99]

**Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit**

Oleh : Muhsin [100-112]

**Pengaruh *Book Tax Differences*, *Roa*, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**

Oleh : Helisa Noviarty, SE, MM [113-130]

**Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Prinsip Akuntansi**

Oleh : Khristina Yunita [131-137]

**Pemanfaatan Aplikasi Handphone (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi)**

Oleh : Rudy Kurniawan [138-149]

**Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi Dan Asimetri Informasi Terhadap Motivasi Melakukan *Fraud***

Oleh : Rusliyawati [150-167]

**Analisis Kebijakan Pemanfaatan Sumber-Sumber Keuangan Desa**

Oleh : Khristina Yunita [168-175]

**Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Akuntansi**

Oleh : Ira Grania Mustika [176-181]

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Mahasiswa Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Oleh : Syarif M. Helmi dan Berlian Apriliana [182-203]

## DESENTRALISASI FISKAL MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI

**Sari Rusmita**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

### Abstrak

Pemerintahan pusat yang ada di Indonesia bersifat sentralistik dan berjalannya waktu sistemnya menjadi desentralistik. Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan bisa membuat pembangunan daerah merata sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Empat hipotesis yang ada hanya satu hipotesis yang diterima yaitu hipotesis yang menyatakan IPM memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hipotesis ini menunjukkan bahwa dengan IPM yang tinggi khususnya berkaitan dengan kualitas manusia dalam pendidikan dan keterampilan. Hal ini dapat mendorong penyerapan tenaga kerja, karena SDM yang siap untuk menjadi tenaga kerja memiliki kualitas pendidikan dan keterampilan yang baik yang dapat dilihat dari nilai IPM yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kemandirian Pemerintah kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat masih belum dilakukan dengan optimal karena belanja pemerintah lebih banyak pada belanja rutin dari pada belanja pembangunan sehingga ini mengindikasikan bahwa potensi dana yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota Kalimantan Barat belum dapat dikatakan produktif.

**Kata Kunci :** Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Penyerapan Tenaga Kerja

### Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi wilayah yang berbeda, mulai dari geografisnya, budaya maupun kondisi ekonominya. Namun pemerintah pusat tidak semua mengerti atau bisa menangani permasalahan yang ada di daerah. Hanya daerah tersebutlah yang mengerti tentang kondisi daerahnya sendiri. Jika suatu daerah terlalu bergantung kepada pemerintah pusat, maka pertumbuhan atau pun pembangunan di daerah akan terhambat. Untuk menjalankan roda perekonomian pemerintah membutuhkan modal yang diantaranya didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer yang diberikan dari pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat jika dalam pemenuhan modal pemerintah daerah hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu bentuk pendelegasian pengelolaan keuangan kepada daerah.

Pada awalnya pemerintahan pusat yang ada di Indonesia bersifat sentralistik dan berjalannya waktu sistemnya menjadi desentralistik karena pada prinsipnya pemerintah daerahlah yang lebih mengerti kondisi masyarakat yang ada di daerah, dan aspirasi masyarakat pun akan cepat tertangani apabila proses birokrasinya dipotong hingga tataran daerah, agar proses penyerapan aspirasi dan penyediaan pelayanan publik dapat berlangsung dengan cepat. Disini lah mulai adanya kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan bisa membuat pembangunan daerah merata sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Menurut teori desentralisasi fiskal bahwasanya dengan di terapkannya desentralisasi fiskal tersebut maka kewenangan pemerintah yang ada di daerah



dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi semakin besar, ini karena proses perpindahan kewenangan yang diberikan oleh pusat ke daerah. Otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi atau pusat kepada tingkatan pemerintahan yang ada dibawahnya atau didaerah. Desentralisasi fiskal juga dapat diartikan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. Singkatnya pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap anggaran. Indonesia yang telah menerapkan sistem desentralisasi sejak dikeluarkannya UU nomor 22 Tahun 1999 diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sesuai dengan karakteristik yang melekat pada daerah tersebut.

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan cara melimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk melakukan pembelanjaan. Saragih (2003) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Ebel dan Yilmaz (2002) untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah. Dia menyatakan terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun sama-sama menggunakan variabel yang pengeluaran dan penerimaan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran (*size variabels*) yang digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Ada tiga *size variabels* yang umum digunakan, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, dan GDP. Dari sisi pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerahnya. Seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur atau pelayanan publik. Dan dari sisi pendapatan adalah seperti transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Menurut Barzelay dalam Sasana (2009) pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu : 1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, 2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Kebijakan dari Desentralisasi Fiskal yang diharapkan adalah seperti meningkatkan kemampuan daerah dalam membangun daerah seperti dalam membangun atau meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja. Dengan meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diharapkan bisa membantu atau meningkatkan IPM menjadi lebih baik. Dengan meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan IPM ini, maka tingkat Penyerapan Tenaga Kerja akan menjadi meningkat. Ini karena Banyaknya

peluang atau penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB di suatu provinsi. Apabila tingkat PDRB meningkat maka semakin banyak juga tenaga kerja yang terserap.

Berdasarkan data BPS Kalimantan Barat tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat tahun 2013, daerah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah Kota Pontianak yaitu sebesar 7.83 dan daerah yang paling rendah yaitu daerah Kabupaten Ketapang sebesar 4.72. Sedangkan pada tahun 2014 daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah daerah Kota Singkawang yaitu sebesar 6.61 dan yang paling rendah masih daerah Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 2.76. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi paling tinggi adalah daerah Kabupaten Kuburaya sebesar 6.21 dan paling rendah adalah Kabupaten Sanggau sebesar 3.15. Sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi paling tinggi ada di daerah Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 7.97 dan yang terendah ada di daerah Kabupaten Melawi sebesar 4.75. Dan pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di daerah Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 7.21 dan yang terendah ada di daerah Kabupaten Melawi sebesar 4.79. Dari data pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dilihat bahwa pemerintah daerah memang belum mampu membuat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat stabil.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kalimantan Barat bisa dilihat bahwa pada data IPM tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan pergerakan yang baik. Walaupun data dari tiap kabupaten tidak sama, sebagian besar atau rata-rata dari data tersebut bisa dilihat bahwa IPM mengalami kenaikan. Kenaikan IPM ini belum mampu membantu tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat menjadi stabil. IPM ini juga akan berpengaruh ke faktor-faktor lainnya seperti kemiskinan, pengangguran hingga menyebabkan penyerapan Tenaga Kerja yang baik. Rata-rata pada data penyerapan tenaga kerja, persentase dari jumlah tenaga kerja terhadap angkatan kerja adalah sebesar 90%. Ini berarti penyerapan tenaga kerja yang ada di Kalimantan Barat sudah cukup baik, tetapi tidak cukup stabil. Ini dikarenakan oleh setiap daerah memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda mulai dari permasalahan ekonomi, sosial, budaya maupun lainnya.

Data pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja pergerakannya belum cukup baik atau berfluktuasi. Ini menunjukkan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum menerapkan kebijakan dengan baik. Masalah ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam membantu perekonomian, kesejahteraan maupun tenaga kerja. Dengan desentralisasi fiskal ini diharapkan mampu membuat pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat menjadi lebih baik. Melihat fenomena yang ada di Kalimantan Barat maka penelitian ini tertarik untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. Dan juga, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi dan sumber informasi maupun data untuk masyarakat dan para peneliti yang sedang atau akan melakukan penelitian membahas topik atau tema sejenis tentang desentralisasi fiskal. Serta penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat, para peneliti dan bermanfaat sebagai masukan kebijakan bagi

Pemerintah Daerah Kalimantan Barat agar dapat membuat pertumbuhan ekonomi meningkat dan mengurangi pengangguran yang ada melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

### Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk kuantitatif yang berarti penelitian ini menggunakan data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Metode penelitian kuantitatif juga merupakan salah satu jenis penelitian yang terperinci, sistematis, dan terstruktur dan penelitian ini menggunakan tabel untuk menunjukkan hasil data yang didapat. Penelitian ini menggunakan data populasi, populasi yang dimaksud yaitu seluruh daerah Kabupaten/Kota atau 12 Kabupaten dan 2 kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data sekunder berbentuk time series dari tahun 2013 sampai dengan 2017, dan data *cross section* yang terdiri atas 12 Kabupaten dan 2 Kota, sehingga merupakan pooled the data yaitu gabungan antara data *time series* (tahun 2013-2017) 5 tahun dengan data *cross section* 12 Kabupaten dan 2 Kota. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat baik dari buku maupun dari website. Selain itu data diambil dari buku berdasarkan tahun terkait, yaitu dari buku tahun 2014 hingga tahun 2018.

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah

1. Desentralisasi Fiskal (X), Desentralisasi fiskal adalah hasil dari antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi total pengeluaran pemerintah. Pada penelitian ini realisasi total pengeluaran pemerintah dilihat dengan realisasi total belanja daerah kabupaten/kota dalam satuan juta rupiah.
2. Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ ), Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB menurut harga konstan tahun 2010, yang dinyatakan dalam satuan persen.
3. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM ( $Y_2$ ), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah.
4. Penyerapan Tenaga Kerja ( $Y_3$ ), Data Penyerapan Tenaga Kerja dalam yang dimaksud adalah jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, dengan lama bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu saat pendataan dilakukan, di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat dalam satuan orang.

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu menggunakan analisis regresi linear. Pengolahan data disini menggunakan program atau aplikasi *Eviews* Versi 10. Berikut bentuk persamaan regresi linear dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{1it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + e \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_{2it} = \alpha + \beta_2 Y_{1it} + e \dots\dots\dots (2)$$

$$Y_{3it} = \alpha + \beta_3 Y_{1it} + e \dots\dots\dots (3)$$

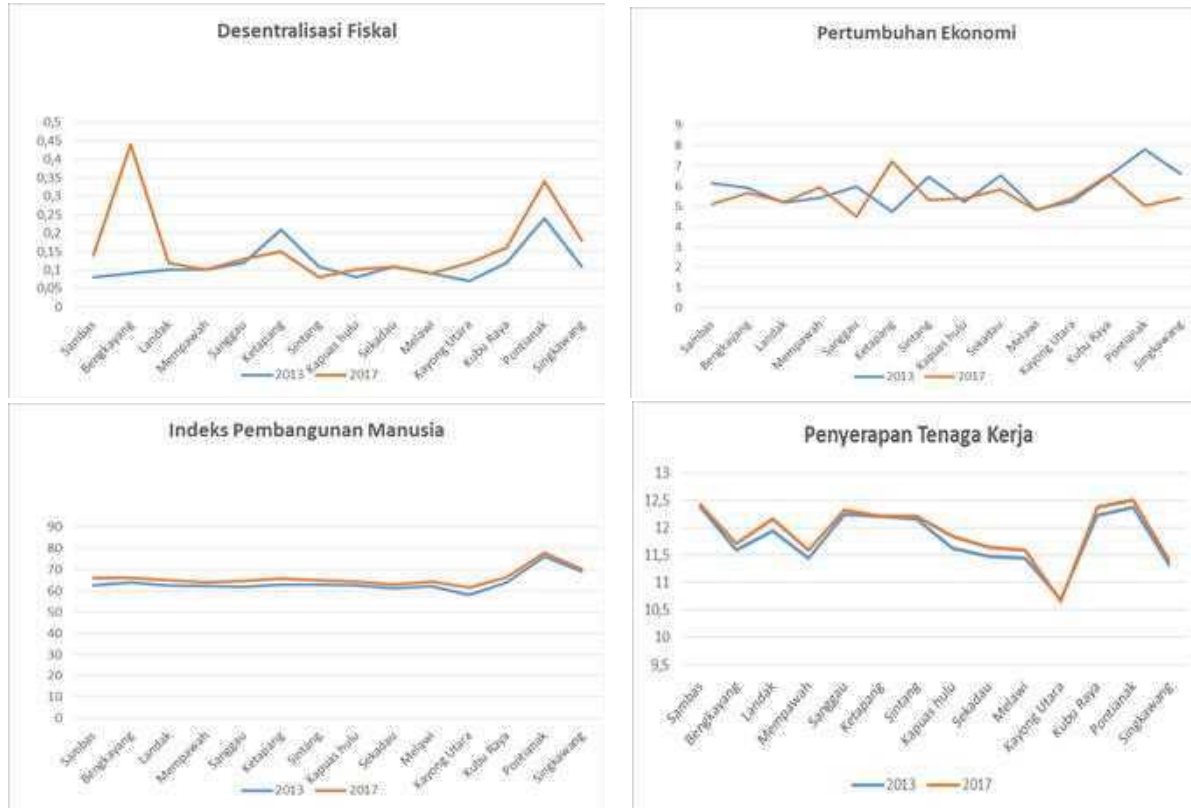
$$Y_{3it} = \alpha + \beta_4 Y_{2it} + e \dots\dots\dots (4)$$

Dimana :

- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien Regresi
- $X_1$  = Desentralisasi Fiskal
- $Y_1$  = Pertumbuhan Ekonomi
- $Y_2$  = Indeks Pembangunan Manusia
- $Y_3$  = Tenaga Kerja Terserap
- $i$  = Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat
- $t$  = Menunjukkan periode waktu ke- $t$
- $e$  = Error

**Hasil Dan Pembahasan**

Berikut ini adalah pergerakan dari data desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, IPM dan penyerapan tenaga kerja yang menjadi variabel dalam penelitian ini untuk tahun 2013 dan 2017 dari data Kabupaten Kota Provinsi di Kalimantan Barat.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan barat, 2019

**Gambar 1. Pergerakan Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dan 2017**

Gambar 1 menunjukkan pola pergerakan dari variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pola pergerakan dari 3 variabel penelitian yaitu desentralisasi fiskal, IPM dan penyerapan tenaga kerja relative sama pada tahun 2013 dengan tahun 2017, namun tahun 2017 menunjukkan capaian lebih

tinggi dari tahun 2013 pada setiap Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan pada variabel pertumbuhan ekonomi, pola pergerakan pada tahun 2013 berbeda dengan tahun 2017. Dimana menunjukkan ada kabupaten yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2013 seperti Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang, Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Namun ada juga kabupaten yang pertumbuhan ekonominya meningkat pada tahun 2017 di banding tahun 2013 yaitu Kabupaten Mempawah dan Ketapang.

Untuk menentukan model yang akan dipakai, terlebih dahulu telah dilakukan pengujian terhadap Model *Common Effect*, Model *Fixed Effect*, dan Model *Random Effect*. Hasilnya menunjukkan Model *Fixed Effect* lebih baik dari pada model yang lainnya, maka dapat dilihat nilai konstanta dan koefisien untuk membentuk persamaan regresi, seperti yang ditunjukkan Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Regresi Dengan Model Fixed Effect Cross Section Weight**

No	Variabel	Konstanta ( $\alpha$ )	Koefisien ( $\beta$ )	Adj R ( $R^2$ )
1	Desentralisasi Fiskal => Pertumbuhan Ekonomi	5,432912	-0,001521	0,158964
2	Pertumbuhan Ekonomi => IPM	64,71361	0,032803	0,941506
3	Pertumbuhan Ekonomi => Penyerapan Tenaga Kerja	11,53684	0,042362	0,815800
4	IPM => Penyerapan Tenaga Kerja	4,643827	0,109768	0,853664

Sumber : Hasil Olahan E-Views 8

Berdasarkan Tabel 1 maka persamaan regresi dalam penelitian adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = 5,432912 - 0,001521 \text{Desentralisasi Fiskal} + e \dots\dots\dots(5)$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 5,432912 memiliki arti bahwa jika variabel independen (desentralisasi fiskal) = 0, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat bertambah sebesar 5,432912 persen. Dan jika desentralisasi fiskal bertambah sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat akan berkurang sebesar 0,001521 persen.

$$\text{IPM} = 64,71361 + 0,032803 \text{Pertumbuhan Ekonomi} + e \dots\dots\dots(6)$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 64,71361 memiliki arti bahwa jika variabel independen (pertumbuhan ekonomi) = 0, maka IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat bertambah sebesar 0,032803 persen. Dan jika pertumbuhan ekonomi bertambah sebesar 1 persen maka IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat akan bertambah sebesar 0,032803 persen.

$$\text{Penyerapan Tenaga Kerja} = 11,53684 + 0,042362 \text{Pertumbuhan Ekonomi} + e \dots\dots\dots(7)$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 11,53684 memiliki arti bahwa jika variabel independen (pertumbuhan ekonomi) = 0, maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat bertambah sebesar 0,042362 persen. Dan jika pertumbuhan ekonomi bertambah sebesar 1 persen maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat akan bertambah sebesar 0,042362 jiwa.

$$\text{Penyerapan Tenaga Kerja} = 4,643827 + 0,109768 \text{IPM} + e \dots\dots\dots(8)$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 4,643827 memiliki arti bahwa jika variabel independen (IPM) = 0, maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi

Kalimantan Barat bertambah sebesar 0,109768 persen. Dan jika IPM bertambah sebesar 1 persen maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat akan bertambah sebesar 0,109768 jiwa.

Hasil terbentuknya persamaan regresi dapat menunjukkan hubungan antara variable dan dapat menjawab hipotesis yang ada dalam penelitian ini. Berikut ini tabel 2 yang menunjukkan hasil pengujian hipotesis.

**Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis**

No	Hipotesis	Arah Hubungan	Sig.	Keputusan Hipotesis
1	Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Negatif	0,7846	Ditolak
2	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap IPM	Positif	0,8927	Ditolak
3	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	Positif	0,2418	Ditolak
4	IPM berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	Positif	0,0002	Diterima

Sumber : Hasil Olahan E-Views 8

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari empat hipotesis yang ada hanya satu hipotesis yang diterima yaitu hipotesis yang menyatakan IPM memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hipotesis ini menunjukkan bahwa dengan IPM yang tinggi khususnya berkaitan dengan kualitas manusia dalam pendidikan dan keterampilan. Hal ini dapat mendorong penyerapan tenaga kerja, karena SDM yang siap untuk menjadi tenaga kerja memiliki kualitas pendidikan dan keterampilan yang baik yang dapat dilihat dari nilai IPM yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara itu, hipotesis yang lain tidak dapat diterima karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, ini menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah belum dapat menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Hal ini mungkin dikarenakan pengeluaran rutin pemerintah kurang produktif jika dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, hal ini mengakibatkan desentralisasi fiskal kurang optimal. Sehingga, mengakibatkan tidak dapat mendorong naiknya tingkat konsumsi yang pada akhirnya juga tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil uji hipotesis lainnya juga menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap IPM dan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif terhadap IPM dan Penyerapan tenaga kerja, ini berarti semakin meningkatnya Pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat juga IPM dan Penyerapan tenaga Kerja. Namun melihat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja yang tidak signifikan, ini menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi tidak selalu mengakibatkan berubahnya IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja karena Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi belum tentu menunjukkan kualitas penduduk dari suatu daerah dan belum tentu dapat menambah lapangan kerja atau mengurangi pengangguran.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tidak selalu mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Ini juga karena besarnya jumlah permintaan tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja kurang seimbang.

Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif terhadap Penyerapan tenaga kerja, ini berarti semakin meningkatnya Pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat juga Penyerapan tenaga Kerja. Tetapi melihat hubungan pengaruh anatar Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja ini tidak signifikan, ini berarti Pertumbuhan Ekonomi tidak selalu mengakibatkan berubahnya tingkat Penyerapan Tenaga Kerja karena Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi belum tentu menambah lapangan kerja atau mengurangi pengangguran. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tidak selalu mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Ini juga karena besarnya jumlah permintaan tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja kurang seimbang.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator kesejahteraan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penyerapan Tenaga kerja, ini berarti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia maka Penyerapan Tenaga Kerja juga akan mengalami peningkatan. Jika disuatu daerah tingkat kesejahteraannya yang pada penelitian ini melihat dari IPM meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat dan mengurangi pengangguran sehingga mengurangi kemiskinan yang ada. IPM yang rata-rata meningkat dari tahun ke tahun yang mengakibatkan Penyerapan Tenaga Kerja akan meningkat. Pada data Indeks Pembangunan Manusia pergerakannya sebagian besar mengalami kenaikan begitu juga dengan data Penyerapan Tenaga Kerja dimana data tersebut juga sebagian besar meningkat juga dari tahun ke tahunnya. ini berarti sesuai dengan hasil regresi Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Dengan meningkatkan kesejahteraan disuatu daerah, bisa membantu kondisi perekonomian didaerah menjadi lebih baik seperti dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi, kemiskinan maupun mampu menyerap tenaga kerja. Karena jika masyarakat sejahtera maka kebutuhan masyarakat sendiri bisa dipenuhi. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia maka masyarakat akan lebih aktif dalam membangun daerahnya sendiri. Hal ini dikarenakan manusia merupakan komponen utama dalam membangun suatu daerah. Dengan aktifnya masyarakat ini maka tenaga Kerja akan terserap karna aktifnya masyarakat dalam membangun daerahnya.

Hasil studi ini mendukung teori Smith bahwa manusia merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengelola sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Subri (2002: 2).

## **Kesimpulan Dan Sarana**

### **Kesimpulan**

Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ini bisa dilihat dari probabilitasnya  $0,7846 > 0,05$ . Selain itu hubungan antara variabel desentralisasi

fiskal ini adalah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini bisa dilihat dari nilai koefisiennya yaitu sebesar -0,001521. Ini dikarenakan tidak sebanding atau tidak seimbang perkembangan daya beli masyarakat dan jumlah penduduk yang ada. Walaupun pun suatu daerah mandiri tetapi jumlah penduduk, jumlah lapangan kerja dan tingkat upah tinggi kurang yang kurang seimbang maka daya beli masyarakat juga tidak tinggi sehingga akan sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu belum mampunya daerah dalam menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal secara produktif dan optimal.

Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan berhubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan IPM. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan membuat penyerapan tenaga kerja dan IPM juga akan meningkat, ini karena dalam meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka suatu daerah tingkat produksinya akan meningkat, dalam proses produksi ini akan mampu menyerap tenaga kerja yang ada sehingga IPM juga meningkat. Tetapi tidak selama meningkatnya pertumbuhan ekonomi bisa menyerap tenaga kerja. Seperti yang ada saat ini dimana teknologi memiliki kemajuan yang pesat. Kemajuan teknologi ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dalam membantu atau mempermudah proses produksi. Dikarenakan penggantian tenaga kerja dengan mesin maka akan kurang menyerap tenaga kerja.

Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. Ini dikarenakan manusia adalah komponen utama atau yang memiliki peran penting dalam membangun suatu daerah. Meningkatnya indeks Pembangunan Manusia maka masyarakat akan lebih aktif dalam membangun daerahnya sendiri. Dengan aktifnya masyarakat ini maka tenaga kerja akan terserap.

## Saran

Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Desentralisasi Fiskal sebaiknya pemerintah bisa menggunakan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya. Daya serap anggaran Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat masih kurang baik. Jika bisa digunakan dengan sebaik-baiknya maka bisa berdampak baiknya kondisi perekonomian.
2. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan investasi asing yang ada. Karena jika investasi asing yang lebih kepada padat modal dan lebih mementingkan teknologi dalam proses produksi maka Penyerapan Tenaga Kerja akan kurang. Sebaiknya investasi asing bisa lebih dialihkan kepada padat karya, sehingga dengan investasi tersebut bisa menyerap tenaga kerja. Selain belanja pemerintah pada belanja langsung seperti belanja dalam infrastruktur juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan mengeluarkan belanja pemerintah dibagian infrastruktur pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dan akan menyerap tenaga kerja.
3. Pemerintah daerah perlu mengkaji ulang mengenai tingkat kelayakan hidup masyarakat. Selain itu pemerintah harus bisa menerapkan masyarakat sebaik-baiknya dalam mengikut sertakan pembangunan didaerahnya sendiri. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Selain itu dengan pemanfaatan masyarakat yang sebaik-baiknya dalam pembangunan ini bisa menambah kapasitas produksi hingga memperbaiki perekonomian.



**Daftar Rujukan**

- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Awandari, Luh Putu. P, dan Indrajaya, I Gst, Bgs. (2016). *Pengaruh Infrastruktur , Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja*. *E-jurnal ekonomi pembangunan universitas udayana Vol 5 No 12, Desember 2016*
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kalimantan Barat Dalam Angka*. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Kalimantan Barat Dalam Angka*. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Kalimantan Barat Dalam Angka*. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Kalimantan Barat Dalam Angka*. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kalimantan Barat Dalam Angka*. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.
- Bahl, Roy W. (2000). *China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Bahl, Roy W. and Sally Wallace. (2001). *Fiscal Decentralization: The Provincial-Local Dimension. Fiscal Policy training Program 2001. Fiscal Decentralization Course. July 23-Agust, 2001. Atlanta-Georgia. World Bank Institute and Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies*.
- Chairul Nizar, dkk (2013). *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 1980-2010*. Skripsi Ilmu Ekonomi Univesitas Syiah Kuala. Aceh
- Damanhuri, D.S dan M. Findi. (2014). *Masalah dan Kebijakan : Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Ebel, R D. dan Serdar Y. (2002). *On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization. World Bank Study 2809, Policy Research Working Paper*.
- Furyanah, Anah dan Sulistiyani. (2019). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Industri Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Sekuritas. Vol.2, No.3, Mei 2019*.
- Iswanto, D. A. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran: Validitas Hukum Okun Di Indonesia*. *Jurnal FEB Universitas Brawijaya*.
- Jhingan, M.L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kemu, Suparman Zen dan R. Nurhidayat. (2005), *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 3*.
- Khusaini, Muhamad. (2006). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFU Unbraw.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan*

*Peluang*. Jakarta: Erlangga.

- Laksono, Richat. T. (2016). *Efektifitas Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 10, No. 2 Mei 2016 Hal. 189 – 202.
- Lapian, A.L.C.P. (2013). *Analisis Faktor – Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Sulawesi Utara*. Disertasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar.
- Nugraheni, D. (2012). *Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, Kemiskinan : Analisis Kabupaten/Kota Di Indonesia 2006 – 2009*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Prasetyo, P. E. (2009). *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Pressman, Steven. (2000). *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Terjemahan Edisi Pertama, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Taufiqur., Suparta, I Wayan., dan Taher, Arivina, Ratih. (2018). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Sumatera*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*. Vol. 7, No. 2. Juli 2018.
- Santi, Nurmainah. (2013). *Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 20, No. 2 September 2013, Hal. 131 – 141.
- Saragih, Panglima Juli. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sasana, Hadi. (2009). *Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 16, No.1. Maret 2009, Hal. 50 – 69.
- Sasana, Hadi. (2009). *Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 103 – 124.
- Soleh, Ahmad dan Ardilla, Ayu. (2018). *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Jambi*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Volume 1 Nomor 2, Desember 2018.
- Subri, Mulyadi, (2002). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rajawali Persada
- Suparmoko, M. (2002). *“Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah”* edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta Yogyakarta: BPFE
- Suparno. (2010). *Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian di Indonesia*. Tesis. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Susanto, A.B dan Rachmawati, L. (2013). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lamongan*. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*.
- Todaro, Michael P and Smith, Stephen C. (2003). *Economic Development*, Eighth Edition, United Kingdom: Pearson Education Limited
- Undang -undang nomor 22 tahun 1999 tentang “*Pemerintahan Daerah*”

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan”

Undang -undang nomor 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”

Undang -undang nomor 32 tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”

Undang -undang nomor 33 tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”

UNSFIRS, (2000). *Indonesia: the National Human Development Report, 2000*. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIRS) and UNDP.

Wijaya, Andi., Indrawati, Toti dan Pailis, Eka, Armas. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau*. *Jom FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober 2014*.

Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomi UII.